



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Partisipasi Perempuan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tobing Kecamatan Aek Nabara Barumun

Desniati Harahap¹, Harmona Daulay², Henri Sitorus³

¹Magister Sosiologi, FISIP, Universitas Sumatera Utara, Indonesia, desniharahap93@gmail.com

²Magister Sosiologi, FISIP, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

³Magister Sosiologi, FISIP, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

*Corresponding Author: desniharahap93@gmail.com¹

Abstract: *PKH (Program Keluarga Harapan) is a social protection program implemented by the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia. PKH is a conditional cash transfer program. The conditions applied in this program serve as an intervention to address issues of social welfare and gender inequality in daily life. Women are the main actors in the participation of beneficiary families in the PKH program. This study examines the forms of participation of mothers receiving social assistance in the implementation of the PKH program in Tobing village, Aek Nabara Barumun subdistrict, Padang Lawas regency. It also identifies the supporting and inhibiting factors of the participation of mothers receiving PKH assistance. Data collection techniques include observation, documentation, and in-depth interviews, while the data analysis employs the Harvard analysis framework. The results of the study indicate that women's participation is relatively optimal. Participation takes the form of labor and thought, starting from the implementation stage, initial meetings and validation, data updates, commitment verification, and transformation of participation. Internal factors influencing the participation of female PKH beneficiary families in Tobing village are driven by the type of work and the condition of underprivileged families. External factors, which also act as drivers of participation, include the obligations that must be fulfilled and the rights that will be received, such as cash assistance that can meet the family's basic needs. The inhibiting factors of participation stem from the top-down nature of PKH activities and the patriarchal system that still prevails among beneficiary families.*

Keyword: *PKH (Family Hope Program), Participation, Harvard Analysis.*

Abstrak: PKH (program keluarga harapan) merupakan program perlindungan sosial yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kementerian Sosial Republik Indonesia. PKH adalah program bantuan sosial bersyarat. Syarat yang diterapkan dalam program ini merupakan bentuk intervensi untuk membidik masalah kesejahteraan sosial dan kesenjangan gender dalam kehidupan sehari-hari. Perempuan sebagai aktor utama dalam kepesertaan keluarga penerima manfaat pada program keluarga harapan (PKH). Peneliti ini melihat bagaimana bentuk partisipasi ibu-ibu penerima bantuan sosial dalam pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) di desa Tobing kecamatan Aek Nabara Barumun kabupaten Padang Lawas. Serta melihat faktor pendukung dan penghambat partisipasi ibu-ibu penerima bantuan PKH. Teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara secara

mendalam. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis Harvard. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi perempuan cukup optimal. Partisipasi berbentuk tenaga dan pikiran, mulai dari partisipasi pelaksanaan, pertemuan awal dan validasi, pemutakhiran data, verifikasi komitmen, dan transporansi kepesertaan. Faktor internal partisipasi perempuan KPM PKH desa Tobing didorong oleh jenis pekerjaan dan kondisi keluarga yang prasejahtera. Faktor eksternal dan juga faktor pendorong partisipasi perempuan KPM PKH desa Tobing adanya kewajiban yang harus dipenuhi dan adanya hak yang akan diterima. Seperti bantuan uang PKH dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Dan faktor penghambat partisipasi disebabkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan PKH masih bersifat *top down* dan sistem keluarga penerima manfaat yang menganut sistem patriarki.

Kata Kunci: PKH (Program Keluarga Harapan), Partisipasi, Analisis Harvard.

PENDAHULUAN

Program keluarga harapan (PKH) merupakan program pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), pemerintah mengklasifikasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang mulai diluncurkan pada tahun 2007. PKH dirancang untuk membantu penduduk miskin klaster pertama berupa bantuan tunai bersyarat (*Cash Conditional Transfer*). Syarat yang diterapkan dalam program ini merupakan bentuk intervensi untuk membidik masalah kesejahteraan dan kesenjangan gender dalam kehidupan sehari-hari (TNP2K, 2012).

Sejak tahun 2014 program keluarga harapan (PKH) telah menyebar keseluruh provinsi di Indonesia. Termasuk provinsi Sumatera Utara kabupaten Padang Lawas kecamatan Aek Nabara Barumun. Jumlah masyarakat miskin di kecamatan Aek Nabara Barumun termasuk kategori tinggi. Periode awal yakni pada tahun 2015-2016 terdapat 340 keluarga penerima manfaat dan tahun 2023 jumlah keluarga penerima manfaat PKH tercatat sebanyak 497 penerima manfaat.

Keluarga adalah kelompok sosial yang berhubungan dengan masalah kekerabatan, tempat tinggal, atau ikatan emosional yang dekat, dan mereka menunjukkan empat ciri sistematis-interpendensi (saling ketergantungan) secara intim, pemeliharaan batas, kemampuan beradaptasi dengan perubahan dan mempertahankan identitas mereka dari waktu ke waktu, dan kinerja tugas-tugas keluarga (Mattessich and Hill, 1987). Di dalam keluarga terdapat pembagian status dan peran antar anggota keluarga. Ada status ayah, ibu dan anak. Keberadaan status tersebut memengaruhi peran yang harus mereka jalankan setiap saat dalam hubungan sosial diantara mereka. Peran yang dilakoni setiap anggota keluarga banyak dipengaruhi oleh adat istiadat tempat tinggal. Termasuk peran seorang perempuan dalam sebuah keluarga.

Penduduk asli Kecamatan Aek Nabara Barumun adalah Suku Batak Angkola, begitu juga dengan penerima manfaat dari PKH di kecamatan tersebut. Karena dari data yang ada tidak ditemukannya Penerima manfaat dari suku lain. Keluarga penerima manfaat PKH memiliki kegiatan rutin setiap bulan yang disebut Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Pertemuan ini di dampingi oleh Pendamping Sosial PKH (Penulis merupakan seorang Pendamping Sosial sejak 2018). Setiap pertemuan akan disampaikan materi satu sesi dari modul yang sudah diberikan Kemensos untuk peningkatan keluarga, seperti pada Modul I Pengasuhan dan Pendidikan Anak yang terdiri dari 4 sesi. Dalam pertemuan ini akan terjadi dialog, antar anggota dan dengan pendamping. Hasil dialog dan diskusi tersebut banyak dan hampir seluruh ibu penerima manfaat memiliki pengalaman yang sama. Bahwasanya peran dan tanggung jawab ayah/laki-laki dalam keluarga sangat minim, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak.

Pekerjaan sehari-hari perempuan penerima manfaat PKH didaerah ini mayoritas buruh tani dan petani, ikut dengan suami ke kebun atau ke sawah. Setelah bekerja dan pulang ke rumah ibu-ibu tersebut akan melanjutkan tugas di rumah, memasak, mencuci, memandikan anak, dan malamnya akan mengajari anak belajar. Sedangkan seorang ayah/suami pulang dari kebun akan langsung bersih-bersih/mandi dan tidak jarang mereka langsung pergi ke *lopo* (kedai kopi) tanpa memperdulikan urusan rumah dan eisinya (ranah domestik). Malam hari pulang langsung makan malam, kemudian lanjut pergi ke *lopo* (kedai kopi) lagi. Hal ini selalu berulang setiap harinya. Pekerjaan domestik hampir tidak diperdulikan oleh ayah/suami pada keluarga penerima manfaat PKH.

Jika waktu pencairan bansos dari PKH tiba, ada beberapa ayah/suami yang meminta bagiannya sendiri (rokok dan pulsa). Padahal kegunaan dari bansos PKH adalah diperuntukkan memenuhi kebutuhan dasar keluarga dan anak-anak (kesehatan dan pendidikan). Dari uraian kasus diatas terlihat budaya patriarki dan beban ganda yang diperankan seorang ibu rumah tangga pada keluarga penerima bantuan PKH. Akibatnya tujuan dari program keluarga harapan (PKH) sulit untuk dicapai di kecamatan Aek Nabara Barumon. Proses pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) di kecamatan Aek Nabara Barumon terdapat berbagai problematika yang dialami oleh masyarakat terutama perempuan dalam mencapai masyarakat yang berkesejahteraan.

Peran gender idealnya, perempuan mendapat hak yang terkait akses dan kontrol pada setiap sumber daya yang ada di rumah tangga yang dijalaninya (Yulianti, 2021). Namun pada realitasnya, diperkotaan dan di wilayah pedesaan, masih banyak perempuan yang menjadi penopang ekonomi keluarga (Risqina, 2019). Sebab itu, penghapusan atas diskriminasi harus dilakukan secara luas agar kesetaraan dapat diwujudkan (Septiana, 2021). Jika hal ini berhasil maka perempuan memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dan dapat mengambil keputusan secara mandiri untuk memanfaatkannya.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai partisipasi perempuan keluarga penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH).

METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Menurut Saryono (2010). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh social yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2011), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan *tri-anggulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian ini lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Jenis penelitian ini masuk pada penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat terkait fakta-fakta. penelitian ini berusaha menggambarkan bagaimana bentuk partisipasi perempuan serta dalam Program Keluarga Harapan

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada daerah suku Batak Angkola (sebagian dari mereka menyebut suku Mandailing) yang memiliki budaya patriarki yang kuat. Dominasi dan kontrol

laki-laki terhadap perempuan dalam semua aspek membuat perempuan (ibu) KPM dalam program keluarga harapan (PKH) tidak berdaya, semua beban kerja domestik dituntut kepada perempuan tanpa memandang kondisi dan situasi. Keterlibatan didalam urusan luar (sosial budaya ekonomi dan politi) hampir tidak terlihat. Akibat dari kasus ketidakadilan gender pada keluarga penerima manfaat PKH berdampak pada pola asuh yang kurang maksimal, sehingga anak-anak banyak yang bolos/tidak hadir ke sekolah, dan tidak sedikit yang putus sekolah. Data ril diambil dari verifikasi pendidikan yang dilakukan Pendamping Sosial ke sekolah secara berkala.

Kehadiran program PKH (sejak 2015) dalam pertemuan bulanan bersama perempuan penerima manfaat PKH memberikan dampak yang positif, salah satunya mereka mulai sadar akan ketidakadilan yang mereka rasakan selama ini.

Tepatnya penelitian akan dilakukan di desa Tobing kecamatan Aek Nabara Barumon kabupaten Padang Lawas provinsi Sumatera Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isu Gender

Defenisi gender di kalangan masyarakat mengartikan gender adalah jenis kelamin. Padahal defenisi gender berbeda dengan jenis kelamin karena gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi oleh sosial dan budaya. Beragam *stereotype* terhadap perempuan dan laki-laki yang berkembang di masyarakat seperti laki-laki dikenal lebih rasional, kuat, agresif dan tegas sedangkan perempuan bersifat emosional, ragu-ragu, pasif dan lemah.

Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya dan adat istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah menurut waktu serta kondisi setempat. Gender muncul dari kebiasaan masyarakat, lama kelamaan menjadi sebuah kultur dan sistem yang tertanam pada masyarakat setempat. Gender pada masyarakat Batak Angkola khususnya masih menempatkan laki-laki sebagai seseorang yang superior. Perempuan menjadi korban dan selalu mendapatkan ketidakadilan gender. Laki-laki yang fisiknya kuat dan memiliki pemikiran yang lebih rasional diutamakan dan dihormati. Konstruksi ini terbentuk oleh ideologi patriarki.

Patriarki adalah sebuah sistem yang tertanam dalam struktur masyarakat, hal ini sering kali menjadi penghalang bagi kemajuan keadilan gender. Kondisi seperti ini tidak jarang terjadi pada masyarakat Batak Angkola, khususnya di desa Tobing kecamatan Aek Nabara Barumon kabupaten Padang Lawas provinsi Sumatera Utara. Dalam kehidupan sehari-hari, patriarki mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi struktur sosial, politik dan ekonomi suatu masyarakat. Kehadirannya mempunyai kekuasaan untuk menciptakan norma-norma yang memihak pihak tertentu dalam hal ini laki-laki dan juga mempunyai kekuasaan untuk menghalangi perempuan menjalankan hak-hak hukumnya.

Bentuk Partisipasi Perempuan Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Tobing

Melihat partisipasi Perempuan dalam PKH disesuaikan dengan hak dan kewajibannya. Hal ini menjadi tolak ukur untuk keberhasilan program yang sesuai tuntunan program keluarga harapan (PKH). Sesuai pedoman pelaksanaan PKH tahun 2021, KPM (keluarga penerima manfaat) memiliki hak dan kewajiban. Jika kewajiban terpenuhi maka otomatis KPM berhak menerima bantuan sosial dari PKH. Untuk lebih jelas berikut akan dipaparkan hak dan kewajiban KPM PKH secara umum:

1. Hak
 - a) Bantuan Sosial (Uang Tunai)
 - b) Pendampingan Sosial

- c) Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial
- d) Program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Berikut tabel pernyataan ibu KPM PKH desa Tobing tentang partisipasi pemenuhan hak dalam pelaksanaan program keluarga harapan (PKH):

Tabel 1. Partisipasi pemenuhan Hak dalam PKH oleh KPM desa Tobing

No.	Informan	Partisipasi Hak
1.	AS	Tidak pernah terlambat mencairkan bantuan sosial PKH, selalu mendapatkan pelayanan terbaik di fasilitas kesehatan dan di fasilitas pendidikan, dan mendapatkan pendampingan yang baik juga.
2.	MS	Tidak pernah terlambat mencairkan bantuan sosial PKH, selalu mendapatkan pelayanan terbaik di fasilitas kesehatan dan di fasilitas pendidikan, dan mendapatkan pendampingan yang baik juga.
3.	NH	Tidak pernah terlambat mencairkan bantuan sosial PKH, selalu mendapatkan pelayanan terbaik di fasilitas kesehatan dan di fasilitas pendidikan, dan mendapatkan pendampingan yang baik juga.
4.	DM	Tidak pernah terlambat mencairkan bantuan sosial PKH, selalu mendapatkan pelayanan terbaik di fasilitas kesehatan dan di fasilitas pendidikan, dan mendapatkan pendampingan yang baik juga.
5.	UK	Tidak pernah terlambat mencairkan bantuan sosial PKH, selalu mendapatkan pelayanan terbaik di fasilitas kesehatan dan di fasilitas pendidikan, dan mendapatkan pendampingan yang baik juga.
6.	AP	Tidak pernah terlambat mencairkan bantuan sosial PKH, selalu mendapatkan pelayanan terbaik di fasilitas kesehatan dan di fasilitas pendidikan, dan mendapatkan pendampingan yang baik juga.
7.	RS	Tidak pernah terlambat mencairkan bantuan sosial PKH, selalu mendapatkan pelayanan terbaik di fasilitas kesehatan dan di fasilitas pendidikan, dan mendapatkan pendampingan yang baik juga.
8.	RM	Tidak pernah terlambat mencairkan bantuan sosial PKH, selalu mendapatkan pelayanan terbaik di fasilitas kesehatan dan di fasilitas pendidikan, dan mendapatkan pendampingan yang baik juga.
9.	TD	Tidak pernah terlambat mencairkan bantuan sosial PKH, selalu mendapatkan pelayanan terbaik di fasilitas kesehatan dan di fasilitas pendidikan, dan mendapatkan pendampingan yang baik juga.
10.	DN	Tidak pernah terlambat mencairkan bantuan sosial PKH, selalu mendapatkan pelayanan terbaik di fasilitas kesehatan dan di fasilitas pendidikan, dan mendapatkan pendampingan yang baik juga.

2. Kewajiban

- a) Komponen kesehatan : wajib memeriksa kesehatan pada layanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan

- b) Komponen pendidikan : wajib sekolah 12 tahun, dan wajib mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% dari hari belajar aktif.
- c) Komponen kesejahteraan sosial : wajib mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan yang dilakukan minimal setahun sekali.
- d) KPM hadir dalam pertemuan kelompok atau P2K2 setiap bulan
- e) Seluruh anggota KPM harus memenuhi kewajibannya, kecuali jika terjadi keadaan kahar (*force majeure*)

Berikut ini dijabarkan pernyataan KPM program keluarga harapan (PKH) desa Tobing tentang partisipasi dalam pemenuhan kewajibannya :

Tabel 2. Partisipasi pemenuhan Kewajiban dalam PKH oleh KPM desa Tobing

No.	Informan	Partisipasi Hak
1.	AS	Selalu aktif dalam melakukan kegiatan P2K2, semua anak bersekolah dan berencana akan menyekolahkan ke jenjang yang lebih tinggi (kuliah). Imunisasi semua anak lengkap, rajin mengikuti posyandu.
2.	MS	Terkadang tidak dapat hadir P2K2 karena beternak kambing. Semua anak bersekolah, anak pertama sudah kuliah saat ini semester I. Aktif mengikuti kegiatan posyandu dan anak-anak semua imunisasi.
3.	NH	Aktif dalam mengikuti kegiatan P2K2. Semua anak bersekolah, anak pertama sedang kuliah semester VII. Dan kegiatan posyandi aktif diikuti.
4.	DM	Aktif mengikuti kegiatan P2K2. Dua anaknya putus sekolah, ada yang tamat SD dan ada yang hanya tamat SMP/ sederajat. Aktif mengikuti kegiatan posyandu.
5.	UK	Aktif mengikuti kegiatan P2k2. Semua anaknya masih bersekolah. Dan kegiatan posyandu aktif diikuti
6.	AP	Turut aktif mengikuti kegiatan P2K2. Semua anak bersekolah sampai tamat SMA sederajat. Dan aktif mengikuti kegiatan posyandu.
7.	RS	Aktif mengikuti kegiatan P2K2. Ketiga anak-anaknya hanya satu yang tamat SMA/ sederajat, anak kedua dan ketiga hanya sampai MTs. Turut aktif melaksanakan kegiatan posyandu.
8.	RM	Jarang mengikuti kegiatan P2K2. Sampai saat ini belum ada anak yang sampai tamat SMA. Anak kelima tidak tamat SD. Kegiatan posyandu aktif dilaksanakan.
9.	TD	Aktif mengikuti P2K2. Semua anak bersekolah dan sudah tamat SMA/ sederajat. Semua anak lengkap imunisasi. Kegiatan posyandu selalu diikuti.
10.	DM	Kadang-kadang tidak dapat hadir dalam pelaksanaan P2K2 karena bekerja. Kedua anaknya bersekolah. Kegiatan posyandu dapat dilaksanakan dan semua anak lengkap imunisasinya.

Secara lebih jelas keseluruhan tahapan atau proses penyelenggaraan PKH diatur dalam Peraturan Menteri Sosial yang termaktub pada pedoman pelaksanaan PKH tahun 2021 ada delapan tahapan penyelenggaraan program yaitu perencanaan, pertemuan awal dan validasi, penetapan KPM PKH, penyaluran bantuan sosial, pemutakhiran data, verifikasi komitmen, pendampingan, dan transformasi kepesertaan.

Indikator tersebut digunakan untuk mengukur dimensi cakupan partisipasi KPM PKH yang dibuat melalui analisis dari landasan teoritis yang disesuaikan dengan yang terjadi lapangan sehingga menghasilkan analisis. yaitu :

1. Tahap perencanaan

Tahap perencanaan PKH ditentukan oleh Kementerian Sosial dan tidak melibatkan masyarakat. Karena tahapan ini dilakukan untuk menentukan jumlah calon penerima

manfaat PKH dan juga lokasi calon penerima manfaat PKH. Masyarakat hanya bisa mengusulkan diri masuk pada DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial), untuk penentu penerima bantuan PKH tidak bisa. Masyarakat yang dipilih oleh kementerian sosial sebagai penerima manfaat PKH akan disurvei dan di validasi petugas lapangan yaitu pendamping sosial PKH.

Sesuai keterangan dari ibu AS, bahwa sebelumnya ia tidak tahu tentang PKH hingga akhirnya didatangi oleh petugas (pendamping sosial PKH). Ibu AS menyebutkan dulu bantuan diterima dari kantor Pos, kemudian setelah PKH ada bantuan Pos pun berakhir. “Kemungkinan bantuan dari pos beralih menjadi bantuan PKH”, ujar ibu AS (wawancara 20 September 2024).

2. Tahap pertemuan awal dan validasi

Tahapan ini melibatkan calon penerima manfaat PKH. Calon KPM yang akan di validasi sesuai data yang diterima pendamping dari kementerian sosial dengan data di lapangan. Calon KPM yang masih ada akan dibuat pertemuan awal sebagai langkah awal pengenalan program keluarga harapan (PKH). Jika calon KPM sudah pindah alamat atau meninggal dunia akan ditindak lanjuti sesuai peraturan yang ada. Calon KPM meninggal dunia akan dialihkan kepada ahli waris, jika masih ada. Dan calon KPM pindah tempat tinggal akan di tulis status pindah alamat. Pada tahapan ini calon KPM yang di validasi di desa Tobing semua aktif berpartisipasi. Sesuai pernyataan masyarakat semua orang pasti menerima bantuan sosial. Sehingga tidak ada alasan untuk *enggan* berpartisipasi.

Pertemuan awal adalah sebagai perkenalan pertama bagi ibu-ibu calon penerima bantuan PKH. Ibu-ibu calon KPM PKH desa Tobing semua *mau* dan bersedia untuk menghadiri pertemuan awal. Ibu AS menyatakan bahwa dirinya masuk menjadi anggota penerima PKH dialihkan dari data mertuanya. Karena data yang akan divaidasi adalah nama Ibu Mertuanya, akan tetapi ibu mertuanya sudah meninggal sehingga dialihkan kepada ahli waris yakni ibu AS. Ibu AS adalah penerima bantuan PKH sejak awal dilaksanakannya PKH di Padang Lawas, yakni periode 2015-2016. Namun untuk calon penerima manfaat diatas tahun 2017 tidak bisa lagi menggantikan dengan pihak keluarga lain, kecuali keluarga dewasa yang masuk dalam satu kartu keluarga.

3. Tahap penetapan KPM PKH

Penetapan KPM PKH ditentukan dari validasi data. Jika data yang divalidasi sesuai dan akurat akan ditetapkan menjadi penerima manfaat bantuan sosial PKH. Dalam hal ini kementerian sosial (direktur jaminan sosial keluarga) yang akan membuat keputusan dan kebijakannya dalam menetapkan KPM PKH.

Sebagaimana pengakuan dari ibu-ibu KPM PKH desa Tobing bahwa masuk menjadi anggota PKH bukanlah mendaftar atau didaftarkan, masuk menjadi penerima manfaat PKH dengan begitu saja. Nama mereka didatangi oleh pendamping, diperiksa atau di validasi dan di perifikasi. Menunggu beberapa minggu, sudah mendapatkan panggilan untuk datang ke Bank Mandiri dalam hal mengambil KKS (kartu kesejahteraan sosial) bantuan PKH, dan atau beberapa diantaranya mengambil bantuan uang tunai ke kantor Pos.

Menurut keterangan pendamping bahwa penetapan KPM PKH didasarkan oleh data yang sudah ada di DTKS. Jika seseorang belum masuk DTKS maka mustahil mendapatkan bantuan PKH. Jika sudah masuk DTKS maka besar kemungkinan akan mendapatkan bantuan PKH.

4. Tahap penyaluran bantuan sosial

Bantuan sosial yang diterima oleh KPM PKH berupa uang non tunai, dicairkan melalui KKS (kartu kesejahteraan sosial) atau buku tabungan dan kantor Pos. KPM

mendapatkan KKS dari Bank himbara yang ditentukan kementerian sosial, kemudian menggunakan KKS sebagaimana mestinya. Pemanfaatan bantuan sosial tersebut diperuntukkan dalam kegiatan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, modal usaha dan kebutuhan lainnya yang didukung tercapainya tujuan PKH. Penyaluran bantuan sosial ini bisa dicairkan sendiri oleh KPM desa Tobing, baik pergi mengambil melalui ATM, e-warung, atau langsung ke Bank Mandiri (bank himbara untuk KKS desa Tobing). Pencairan melalui kantor Pos akan membawa KTP dan Kartu Keluarga asli, yaitu syarat untuk bisa menerima bantuan sosial PKH.

Ibu-ibu KPM PKH desa Tobing dalam mencairkan bantuan sosial PKH dengan pergi ke agen Bank Mandiri yang ada di kecamatan.

5. Tahap pemutakhiran data

Pemutakhiran data adalah mengetahui kondisi KPM saat ini (*up date* data) digunakan sebagai data dasar program perlindungan sosial, yakni verifikasi, penyaluran dan penghentian bantuan. Pemutakhiran data dilaksanakan setiap ada perubahan sebagian atau seluruh data keluarga penerima manfaat PKH. Pemutakhiran data dilakukan langsung oleh pendamping sosial PKH kepada KPM desa Tobing.

6. Tahap verifikasi komitmen,

Verifikasi komitmen KPM PKH dilakukan untuk memastikan seluruh anggota keluarga KPM aktif, hadir dan mengakses fasilitas kesehatan dan pendidikan dan kesejahteraan sosial. Metode verifikasi komitmen dilakukan secara *systemic automatic*. Artinya keaktifan anggota keluarga pada fasilitas Kesehatan dan Pendidikan bisa langsung terdeteksi dalam aplikasi DTKS, karena DTKS sudah terkoneksi langsung dengan dapodik (kemendikbud) atau EMIS (kemenag), dan posyandu desa. Kemudian didukung oleh kader Kesehatan desa yang aktif mengingatkan Masyarakat untuk memeriksa Kesehatan keluarga.

Pada tahapan ini partisipasi KPM PKH desa Tobing dikatakan baik. Karena pendamping sosial PKH akan melakukan verifikasi langsung kemudian ibu-ibu tersebut akan menerima dan melaksanakan arahan sesuai permintaan pendamping.

7. Tahap pendampingan,

Pendampingan PKH terdiri dari advokasi, fasilitasi, mediasi bagi keluarga penerima manfaat PKH dalam mengakses fasilitas kesehatan pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Tujuan dari pendampingan adalah memastikan KPM mendapatkan haknya dan memenuhi kewajibannya serta memahami program keluarga harapan (PKH), tepat sasaran dan tepat guna sehingga tujuan PKH tercapai.

Tahapan pendampingan KPM PKH Tobing telah terpenuhi namun belum maksimal dapat dilihat dari anggota keluarga KPM yang pindah sekolah ke sekolah kesetaraan (PKBM). Meskipun dalam kegiatan PPKK tergolong aktif dalam menghadirinya, namun aplikasi atau pengamalan dari modul-modul yang disampaikan pendamping sosial belum dilaksanakan dalam keluarga. Hal ini karena tidak adanya dukungan suami atau pihak laki-laki dalam keluarga (keluarga sistem patriarki).

8. Tahap transformasi kepesertaan

Sejak PKH dilaksanakan di desa Tobing, KPM graduasi secara mandiri dan sejahtera belum ada. Padahal enam tahun kepesertaan PKH diharapkan terjadi perubahan perilaku baik di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial dan meningkatnya status sosial ekonomi. Graduasi KPM di desa Tobing disebabkan habisnya komponen atau

disebut graduasi alami. Jika komponen habis otomatis akan diberhentikan bantuan sosialnya oleh sistem.

Fakta dari keadaan KPM sebagian sudah ada yang mampu untuk graduasi, akan tetapi belum mau untuk keluar dari kepesertaan PKH. Padahal kondisi ekonomi sudah memadai. Ibu A salah satunya, sudah memiliki usaha menjahit dan jualan klontong namun tidak mau graduasi. Ibu tersebut menyatakan belum bisa keluar dari PKH disebabkan semua anaknya masih sekolah. Dan menganggap keadaanya masih belum mampu secara ekonomi.

Berikut adalah bentuk partisipasi (Santoso Sastroputro, 1988) KPM dalam program keluarga harapan (PKH):

- a) **Partisipasi buah pikiran**, adalah jenis partisipasi KPM diberikan seperti menyumbangkan buah pikiran, pengalaman, pengetahuan dalam pertemuan kelompok, dan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) setiap bulannya. Partisipasi buah pikiran atau berpendapat bagi PKM dalam pertemuan bulanan, sebagaimana pernyataan dan penjelasan Pendamping adalah KPM kebanyakan aktif berpartisipasi dibandingkan yang pasif. KPM aktif memberikan pendapat untuk kelancaran pertemuan bulanan.
- b) **Partisipasi tenaga**, adalah jenis partisipasi yang diberikan dalam berbagai kegiatan PKH, KPM juga aktif berpartisipasi. Partisipasi dalam melaksanakan kewajiban dan partisipasi menerima haknya. Namun partisipasi dari anggota keluarga KPM di fasilitas Pendidikan masih tergolong rendah. Pendamping PKH menuturkan bahwa minat sekolah anak-anak KPM PKH desa Tobing rendah, diantara mereka ada yang putus sekolah tanpa ada alasan dan sebagiannya karena menikah. Minat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi juga masih rendah,
- c) **Partisipasi harta benda**, partisipasi KPM untuk keberlangsungan kegiatan PKH tergolong aktif. Setiap pertemuan bulanan KPM bersedia memberikan rumah untuk dijadikan tempat berkumpulnya semua KPM.
- d) **Partisipasi keterampilan dan kemampuan**, KPM memberikan partisipasi keterampilannya untuk berbagi ilmu dengan anggota lain.
- e) **Partisipasi sosial**, adalah jenis partisipasi yang diberikan sebagai tanda kegyuban, seperti turut arisan, koperasi, melayat (dalam peristiwa kematian) tabungan dan sebagainya. Dalam hal ini KPM PKH desa tobing aktif berpartisipasi. Desa tobing merupakan suku Batak Angkola yang menjunjung tinggi system kekerabatan *dalihan na tolu*, nilai-nilai adat, gotong royong, saling bekerja sama,

Bentuk-bentuk partisipasi tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di lapangan. Beberapa bentuk-bentuk partisipasi dapat dilaksanakan oleh KPM dengan baik. Bentuk partisipasi KPM lebih terlihat pada pemanfaatan program berupa bantuan tunai yang didapatkan melalui KKS (kartu kesejahteraan sosial) atau diterima melalui Kantor Pos Indonesia. Partisipasi KPM desa Tobing pada pemanfaatan bantuan komplementer lainnya, yaitu berupa pemanfaatan fasilitas Pendidikan dan Kesehatan masih kurang maksimal dilaksanakan, baik ibu ataupun anak dari KPM PKH desa Tobing. Ketidaktaksimalan tersebut dipengaruhi oleh berbagai hal salah satunya keluarga. Keluarga sistem patriarki menjadi penyebab sulitnya mencapai keberhasilan tujuan dari program keluarga harapan (PKH) di desa Tobing.

Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Partisipasi Perempuan Pada Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Tobing

1. Faktor Pendorong

Partisipasi KPM PKH desa Tobing dilihat dari faktor internal terhadap kegiatan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) merujuk pada pendapat Cohen J. and Uphoff

yaitu faktor umur, jenis kelamin, status dalam keluarga, tingkat pendidikan, agama, bahasa, pekerjaan, tingkat pendapatan, jarak rumah dengan lokasi pekerjaan atau aktivitas.

Faktor internal yang berpengaruh terhadap partisipasi ibu-ibu KPM perogram keluarga harapan (PKH) dipengaruhi oleh pekerjaan dan kondisi keluarga. Kondisi keluarga yang dikategorikan pra sejahtera membuat ibu-ibu KPM PKH desa Tobing turut aktif dalam memenuhi hak dan kewajibannya dengan harapan kondisi ekonomi keluarga berubah menjadi lebih baik.

Faktor eksternal adalah semua pihak luar yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program tersebut (Sunarti, 2003). Partisipasi KPM dalam kegiatan PKH didorong oleh faktor eksternal, yaitu karena adanya kewajiban yang harus dipenuhi sehingga bisa mendapatkan hak berupa bantuan sosial uang dari PKH. Adanya bantuan sosial yang diberikan PKH karena KPM memenuhi syarat atau melaksanakan kewajibannya sebagai keluarga penerima manfaat dari PKH.

Ibu AP berkata bahwa selain karena kegiatan PKH adalah kewajiban, dan otomatis mendapatkan bantuan. Bagi ibu AP tidak ada masalah untuk meluangkan waktu mengikuti pertemuan setiap bulan. Anak-anak juga dimotivasi untuk selalu hadir di sekolah agar bantaun yang diterima tidak berkurang.

Selain dipengaruhi oleh faktor bansos, dipengaruhi oleh dorongan pendamping sosial PKH dalam mengajak KPM untuk aktif melaksanakan semua kewajiban di PKH. Selain itu pendamping sosial PKH bekerja sama dengan ketua kelompok yang sudah disetujui bersama mengingatkan ibu-ibu PKH dalam setiap kegiatan. Dalam mengikuti kegiatan posyandu selalu di ingatkan petugas kader posyandu atau kader KB desa Tobing.

Peran petugas Pendamping PKH dan kader kesehatan, dalam mengedukasi KPM PKH desa Tobing sangat kuat. Ibu UK menyampaikan bahwa Pendamping Sosial PKH selalu memberikan dampingan yang baik berupa tenaga dan fikiran untuk KPM desa Tobing. Selain pertemuan bulanan Pendamping Sosial PKH sering melakukan kunjungan lapangan ke desa Tobing, agar terbentuknya hubungan emosional yang baik dengan ibu-ibu KPM PKH. Dalam pertemuan bulanan yakni sekolah PKH pendamping mendorong ibu-ibu KPM untuk aktif dalam mendengarkan Modul materinya, walaupun belum dapat maksimal mengimplementasikan dalam kehidupan keluarga KPM. Tapi pendamping sosial sering mengingatkan untuk generasi penerus bangsa perlu ada perubahan agar terwujudnya anak-anak yang membanggakan.

2. Faktor penghambat

Kegiatan KPM desa Tobing dalam program keluarga harapan (PKH) dapat dikatakan kurang baik terutama dalam mengakses bidang Pendidikan. Pernyataan yang dipaparkan oleh ibu-ibu KPM yang menjadi hambatan internal dalam pelaksanaannya, baik dalam mengakses fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan kegiatan P2K2 yaitu berkaitan dengan beban kerja perempuan yang dominan dalam melaksanakan pekerjaan domestik. Ibu-ibu dihadapkan pada pekerjaan mencari nafkah dan dituntut untuk sempurna dalam mengurus rumah dan seisinya (menjaga anak). Peran suami atau ayah hampir tidak terlihat dalam pendidikan dan pengasuhan anak dan pekerjaan domestik. Sehingga anak-anak yang harusnya masih sekolah, akhirnya putus sekolah. Dorongan dalam diri (motivasi) anak untuk bersekolah sangat rendah, dukungan orang tua juga tidak masimal (peran ayah hampir tidak terlihat), dan lingkungan (teman) yang menggoda agar tidak sekolah menjadikan anak-anak dari peserta penerima PKH banyak yang tidak bersekolah/putus sekolah/tidak lanjut sekolah.

Letak desa Tobing dikategorikan dekat dengan ibu kota kecamatan, dimana terdapat banyak sekolah, ada SMP Negeri, MTS Negeri, MAN, juga ada MTS dan MA swasta bisa berjalan kaki sekitar 10 Menit.

Ibu MS yang ikut kerja mencari nafkah menyatakan tidak jarang ia membentak anaknya dan kadang memukul, karena disaat melakukan pekerjaan rumah (memasak) anaknya sering merengek. Dalam kondisi capek dan lelah setelah pulang dari Kebun, sampai di rumah harus memasak dan memandikan anak-anaknya. Dan suami tidak mau tahu keadaan rumah dan anak-anak, tidak mau membantu Ibu MS dalam pekerjaan rumah dan mengasuh anak. Kata Ibu MS sering khilaf karena kecapean dan akhirnya anak-anaknya menjadi sasaran amarahnya.

Penulis mengutip dari website Narasi menyatakan bahwa Indonesia peringkat 3 sebagai fatherless country di Dunia. Hal tersebut berarti banyak anak Indonesia kekurangan sosok ayah dalam hidupnya. Psikolog asal Amerika Edward Elmer Smith mengatakan bahwa fatherless country berarti negara yang masyarakatnya memiliki kecenderungan tidak merasakan keberadaan dan keterlibatan figur ayah dalam kehidupan anak, baik secara fisik maupun psikologis. Fatherless tidak diartikan anak yatim, akan tetapi maksud dari fatherless adalah anak-anak yang kehilangan peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan di dalam keluarga.

Faktor penghambat partisipasi KPM dalam implementasi atas modul materi P2K2 yang disampaikan pendamping sosial dalam rumah tangga salah satunya adalah karena budaya patriarki. Modul I adalah tentang pengasuhan dan pendidikan anak mengajak suami dan istri KPM PKH agar saling bekerja sama untuk mengasuh anak. Ibu-Ibu KPM PKH desa Tobing juga sangat setuju dengan materi tersebut, akan tetapi para ayah sangat sulit diajak untuk bekerja sama dalam mengasuh dan mendidik anak-anak mereka. Pendamping Sosial PKH menyebutkan bahwa kaum bapak masih kuat memegang budaya patriarki, yang mereka artikan urusan rumah adalah pekerjaan istri atau kaum perempuan.

Kemudian pada modul kesehatan dan gizi dianjurkan untuk menjaga kesehatan keluarga, terutama pada ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi/balita. Ibu dan ayah harus saling bekerja sama untuk menjaga kesehatan keluarga, memeriksa kesehatan ke posyandu secara rutin. Ayah atau suami harus siaga yaitu siapsiaga dengan kondisi istri yang sedang hami, melahirkan, nifas dan bayi untuk mewaspadai resiko yang muncul.

Menurut keterangan dari ibu RS bahwa suaminya kurang siap dalam menjaga kesehatan keluarga mereka. Ketika sedang hamil pekerjaan mencari nafkah dan rumah selalu ia kerjakan, dan perhatian suami untuk meringankan pekerjaan hampir tidak terlihat. Ketika sedang nifas, setelah melahirkan juga ibu RS harus menjaga kesehatan tubuhnya dan bayinya. Namun suaminya tidak optimal dalam menjaganya. Seminggu setelah melahirkan Ibu RS sudah melakukan aktifitas di rumah, memasak, mencuci pakaian dan piring. Berbeda dengan ibu RM, yang memprihatinkan adalah dua hari setelah melahirkan ia harus melakukan aktifitas biasa di rumah karena suaminya tidak mau melakukan pekerjaan rumah. Padahal jika seorang suami berperan aktif dalam menjaga istri yang sedang nifas maka ASI yang diproduksi oleh bayinya jauh lebih baik dan berkualitas. Sebagaimana dikutip dari website ALODOKTER bahwa manusia memiliki hormon oksitoksin yang sering di istilahkan hormon cinta, kasih sayang, emosi yang baik dan keterikatan antar manusia. Hormon oksitoksin sangat berperan dalam proses persalinan dan menyusui bagi seorang ibu. Untuk menjaga hormon oksitoksin istri salah satunya adalah kehadiran suami siaga dalam keluarga sehingga akan terwujud generasi atau SDM yang lebih baik.

Analisis Teori Gender Model Harvard pada Perempuan Keluarga Penerima Bantuan (KPM) PKH desa Tobing

1. Profil Aktifitas

Profil aktivitas anggota keluarga penerima manfaat PKH (laki-laki dan perempuan), tentang aktifitas produksi (publik) dan aktifitas reproduksi. Baik istri dan anak perempuan serta ayah dan anak laki-laki. Adapun hasil yang di dapatkan dari pernyataan KPM adalah :

a) Aktifitas Produksi (Publik)

Aktifitas produksi terlihat perbedaan antara profil aktifitas laki-laki dan profil aktifitas perempuan, baik istri-suami dan anak laki-laki-perempuan. Pekerjaan dalam bidang perkebunan yaitu kebun sawit didominasi oleh laki-laki, karena pekerjaan yang membutuhkan tenaga yang kuat dan lebih sulit. Ibu TD menyatakan ikut bekerja di kebun sawit jika hendak memupuk dan mengambil *brondolan*, namun untuk mendodos dan mengangkat buah sawitnya dilakukan oleh anak laki-laki dan suaminya. Untuk membersihkan kebun dibagi dua metode, yang pertama menggunakan mesin (*membabat*) dan yang kedua menggunakan obat racun rumput dengan menggunakan alat pompa. Ibu TD menyebutkan metode menggunakan mesin biasanya dilakukan suaminya atau memanggil orang (laki-laki), namun metode kedua bisa dikerjakan suaminya dan kadang-kadang ibu TD juga ikut mengerjakannya.

Lain halnya dengan ibu-ibu PKH yang bekerja serabutan sebagai tukang pembersih rumput kebun. Biasanya menggunakan Sapal/Sprayer dengan obat racun rumput. Ibu-ibu yang bekerja sebagai tukang bersih kebun, Ibu M menyatakan sudah lama melakukan pekerjaan ini. Ibu DM melakukan pekerjaan ini untuk menambahi keuangan keluarga, karena kebutuhan yang harus dipenuhi tidak dapat tercukupi jika hanya mengandalkan hasil uang PKH atau hasil dari sawah.

Pekerjaan dalam bidang pertanian (sawah) lebih didominasi pihak perempuan. Karena pekerjaan di sawah tidak menggunakan tenaga kuat kecuali setelah panen laki-laki akan ikut mengangkat hasil panennya. Ibu DN sebagai seorang petani menyatakan ia lebih sering ke sawah dibandingkan suaminya. Ibu DR menyatakan pekerjaan yang tidak membutuhkan tenaga kuat, akan lebih sering dikerjakan perempuan. Pekerjaan di sawah di ikuti pihak laki-laki (suami dan anak laki-laki) biasanya ikut bekerja pada saat penanaman padi, dan waktu panen padi. Namun beberapa ada juga suami yang ikut bekerja saat membasmi hama padi atau memupuk padi. Jika dihitung-hitung pekerjaan perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, durasi lebih lama karena istri ikut bekerja mulai dari menanam padi, memberikan pupuk, membersihkan hama, sampai panen.

Pekerjaan pada bidang perdagangan (berjualan), disini tidak terlihat ketimpangan peran. Ibu NH sebagai seorang janda, yang sudah lama ditinggal mati suaminya melakukan aktivitas berdagang dilakukan seorang diri. Kegiatan berjualan di pasar dilakukan hanya sekali dalam seminggu, dan ketika ia berjualan di pasar anak-anaknya masih bersekolah.

Berbeda dengan ibu AS yang berjualan klontong di rumahnya. Ibu AS menyatakan bahwa pekerjaan berjualan sama-sama dikerjakan olehnya dan suami dan juga anak-anaknya (anak perempuan dan anak laki-laki) namun durasi lebih lama dibandingkan suami. Ibu AS dan anak-anaknya stand by di rumah menjaga toko sedangkan suaminya yang belanja barang dagangan ke pasar. Ibu AS juga menyatakan bahwa anak-anaknya sering ia suruh untuk ikut membantu berjualan di rumahnya. “Mereka (anak-anaknya) ikut bekerja membantu saya di rumah, mereka bekerja bukan untuk mencari nafkah tapi hanya membantu melakukan pekerjaan di rumah saja dan tidak menyita waktu belajar dan bermain mereka” ujar ibu AS.

Aktivitas domestik, atau pekerjaan rumah sangat terlihat jelas perbedaan laki-laki dengan perempuan. Ibu-ibu PKH desa Tobing serentak menyatakan semua pekerjaan rumah dilakukan oleh mereka, dan dibantu anak perempuan mereka. Baik kegiatan memasak, mencuci baju, mencuci piring, membersihkan rumah, belanja, dan merawat/menjaga anak. Semua dikerjakan istri, kecuali istri sedang partus sang suami akan bersedia melakukan pekerjaan rumah akan tetapi tidak semaksimal yang dikerjakan istri. Pekerjaan rumah yang dilakukan suami biasanya jika ada yang harus diperbaiki, misalnya atap bocor atau mengganti bola lampu.

Sebagian ibu-ibu PKH desa Tobing mengaktakan mereka sangat bersedia dibantu dalam urusan pekerjaan rumah. Karena sudah capek bekerja di kebun, pulang ke rumah masih harus mengurus isi rumah (memasak, membersihkan rumah, memandikan anak, hingga mengajari anak belajar malam). Sedangkan Suami jika sudah bekerja di kebun, sepulangnya dari kebun tidak lagi melakukan pekerjaan apa-apa selain bersantai atau mengurus diri sendiri saja. Berbeda dengan ibu-ibu yang lain, Ibu R menyebutkan pekerjaan rumah adalah tugas istri atau perempuan. Ibu R menyatakan pekerjaan rumah menjadi tanggung jawab istri, karena istri harus melayani suaminya dengan baik. “Jika pekerjaan rumah dikerjakan suami saya atau anak laki-laki saya, saya tidak sanggup melihatnya. Seperti saya udah tiada saja” ujar ibu RM.

Aktifitas diatas memperlihatkan bagaimana peran dan tugas perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Perbedaannya jauh lebih besar tugas yang diemban perempuan dibandingkan laki-laki. Selain ikut mencari nafkah perempuan juga yang mengerjakan semua pekerjaan domestik, termasuk dalam mengasuh dan mendidik anak. Peran ayah sangat kecil sekali dalam pengasuhan anak. Padahal keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Ayah dan Ibu memiliki tanggung jawab yang sama meskipun menjalankan peran yang berbeda (Modul Pengasuhan dan Pendidikan Anak).

2. Profil Akses dan Kontrol

Saat ditanya tentang kepemilikan rumah, harta dan kebun ibu-ibu PKH desa tobing, serentak mereka menyatakan atas nama suami. Contohnya sepeda motor yang mereka miliki semuanya mengatasnamakan suami. Ibu RM menjawab sepeda motor, rumah dan kebun yang mereka miliki semua atas nama suami, karena suami adalah kepala keluarga. Untuk pemakaian harta benda dipakai bersama-sama. Namun untuk sepeda motor lebih sering dipakai oleh suami dan anak laki-laki. Suami atau anak laki-laki bisa memakai sepeda motor untuk bermain, baik menonton turnamen bola atau sekedar jalan-jalan. Berbeda dengan istri atau anak perempuan yang hanya memakai sepeda motor seperlunya saja. Sama halnya dengan hasil panen dari kebun yang mereka miliki, bahwa uang dari panen tersebut dikontrol oleh suami. Suami memberikan uang belanja kepada istri dan pasti mengambil bagian untuk dirinya sendiri (membeli rokok dan pulsa).

Terlihat jelas perbedaan akses dan kontrol dalam keluarga ibu-ibu PKH desa Tobing. Akses dan kontrol didominasi oleh suami atau pihak laki-laki.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akses dan Kontrol

a) Norma-norma sosial dan hirarki Sosial

Hambatan (*constraints*) yang terjadi : sistem keluarga patriarki dalam keluarga KPM PKH menjadikan perempuan (istri dan anak perempuan) pada posisi yang lemah. Perempuan (istri dan anak perempuan) harus patuh dan taat terhadap laki-laki (suami dan anak laki-laki) meskipun itu diuar dari keinginan perempuan. Semua tugas reproduktif (domestik) hampir tidak terlihat dilakukan oleh laki-laki (suami dan anak laki-laki) dalam keluarga KPM PKH desa Tobing.

Kesempatan (*opportunities*) yang ada: program keluarga harapan (PKH) memberikan pemahaman dan kesadaran kepada perempuan melalui PPKK, bahwa kerja sama antar perempuan (istri dan anak perempuan) dengan laki-laki (suami dan anak laki-laki) dalam sebuah keluarga akan menghasilkan keluarga yang lebih sehat dan sejahtera.

b) Struktur kelembagaan

Hambatan (*constraints*) yang terjadi : Program keluarga harapan (PKH) menjadikan perempuan dewasa sebagai pengurus bantuan PKH dalam keluarga. Karena perempuan dianggap mampu mengelola keuangan keluarga dengan baik dibandingkan laki-laki. Untuk mencapai tujuan dari PKH, maka kebijakan tersebut tidak sepenuhnya berhasil.

Karena kontrol laki-laki dalam keluarga lebih dominan dan kerja sama yang masih rendah dalam keluarga KPM PKH desa Tobing.

Kesempatan (*opportunities*) yang ada: program keluarga harapan (PKH) memberikan kesempatan pada perempuan untuk memahami bahwa keluarga sejahtera harus didukung semua keluarga. Peran dan tanggung jawab dalam keluarga tidak dibebankan hanya pada perempuan.

c) Faktor Ekonomi

Hambatan (*constraints*) yang terjadi : keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) adalah keluarga yang rentan miskin, ekonomi keluarga rendah, dan biasanya memiliki pendidikan rendah. KPM desa Tobing memang memiliki kebun, tapi hanya sedikit. Padi yang mereka tanami juga berada di sawah orang, sistemnya mengongkos yang setiap panennya harus memberikan 3 karung per 10 karung. Belum lagi untuk perawatannya dan upahan *getor* (pembersih padi).

Kesempatan (*opportunities*) yang ada: program keluarga harapan (PKH) memberikan bantuan sosial untuk dapat dimanfaatkan oleh KPM sebaik mungkin. Membuka usaha misalnya untuk menambah penghasilan keluarga. Namun tidak dapat diperbuat oleh KPM desa Tobing karena faktor ekonomi desa Tobing sangat rendah dan daya jual beli yang masih rendah. Jika dibandingkan dengan KPM desa lain yang ada di kecamatan Aek Nabara Barumun desa Tobing rendah dalam mengelola keuangan keluarga. Karena desa-desa lain mengambil kesempatan untuk membuka usaha untuk menambah penghasilan dalam keluarga (memperbaiki ekonomi keluarga). Tidak sedikit KPM desa-desa lain yang bisa graduasi karena telah berhasil dalam usahanya.

KESIMPULAN

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan beberapa hal terkait partisipasi perempuan khususnya ibu-ibu KPM program keluarga harapan (PKH) desa Tobing dalam pelaksanaan proses bisnis PKH sesuai kebijakan pemerintahan kementerian sosial :

1. Partisipasi perempuan pada program keluarga harapan (PKH) di desa Tobing kecamatan Aek Nabara Barumun kabupaten Padang Lawas cukup optimal. Bentuk partisipasi perempuan KPM PKH di desa Tobing berupa tenaga dan pikiran. Pada tahap perencanaan program keluarga harapan (PKH) dan penetapan KPM tidak melibatkan masyarakat penerima manfaat dalam merancang program. Karena program keluarga harapan (PKH) sebagai salah satu kebijakan sosial bersifat *top down*, artinya tidak melibatkan masyarakat khususnya peserta program keluarga harapan (PKH) dalam mengambil keputusan. Semua kebijakan dalam program keluarga harapan (PKH) dirancang oleh pemerintah pusat yang membuat kebijakan. Peserta program keluarga harapan (PKH) hanya diminta mematuhi semua kewajiban dan menjalankan hak nya. Hak yang diterima keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) desa Tobing terpenuhi dengan baik, akan tetapi untuk memenuhi kewajibannya masih perlu perhatian dan penanganan yang mendalam. Partisipasi dalam pendidikan tidak dapat memenuhi wajib belajar (12 tahun) bagi anak-anak KPM program keluarga harapan (PKH). Terdapat banyak anak yang putus sekolah disebabkan kurangnya motivasi.
2. Partisipasi pada tahap pertemuan awal dan validasi bagi perempuan desa Tobing sangat antusias. Ibu-ibu KPM PKH turut aktif mengikuti proses pertemuan awal dengan pendamping sosial beserta pemerintah desa untuk melakukan validasi data dari kemensos disesuaikan dengan kartu keluarga dan KTP masing-masing. Jika ada calon penerima manfaat yang sudah meninggal pada tahun 2015 silam bisa digantikan dengan pihak keluarga walaupun tidak satu kartu keluarga. Namun pada tahun 2017 sampai sekarang hanya bisa dgantikan dengan orang dewasa dalam satu kartu keluarga.

3. Partisipasi pada tahap penyaluran bantuan sosial seluruh penerima manfaat aktif berpartisipasi dalam menerima atau mencairkan uang yang diperoleh. Sesuai pernyataan ibu AS jika waktu pencairan sudah tiba, ibu-ibu KPM PKH buru-buru mengambil KKS masing-masing untuk dapat disalurkan bantuannya.
4. Partisipasi pada Tahap pemutakhiran data dan tahap verifikasi komitmen bagi ibu-ibu KPM PKH desa Tobing turut aktif, karena pemutakhiran data adalah pondasi utama untuk memperoleh bantuan sosial. Dan pada tahap verifikasi komitmen pendamping sosial PKH akan melakukan verifikasi langsung kemudian ibu-ibu tersebut akan menerima dan melaksanakan arahan sesuai permintaan pendamping.
5. Tahapan pendampingan KPM PKH Tobing telah terpenuhi dengan baik, namun belum maksimal dapat dilihat dari anggota keluarga KPM yang pindah sekolah ke sekolah kesetaraan (PKBM) dan beberapa diantaranya putus sekolah. Dan partisipasi pada tahap transformasi kepesertaan di desa Tobing dikatakan rendah, karena tingkat graduasi mandiri/sejahtera tidak ada. Graduasi atau keluar dari kepesertaan PKH di desa Tobing masih ada graduasi alami yaitu karena habis komponen.
6. Faktor internal yang berpengaruh terhadap partisipasi ibu-ibu KPM perogram keluarga harapan (PKH) desa Tobing dipengaruhi oleh pekerjaan dan kondisi keluarga. Kondisi keluarga yang dikategorikan pra sejahtera membuat ibu-ibu KPM PKH desa Tobing turut aktif dalam memenuhi hak dan kewajibannya dengan harapan kondisi ekonomi keluarga berubah menjadi lebih baik. Dan faktor eksternal pada partisipasi KPM dalam kegiatan PKH didorong oleh adanya kewajiban yang harus dipenuhi sehingga bisa mendapatkan hak berupa bantuan sosial uang dari PKH. Dan faktor pendukung lainnya adalah adanya kontrol dari pendamping PKH, petugas kesehatan dan juga petugas Pendidikan.
7. Faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan proses bisnis program keluarga harapan (PKH) di desa Tobing dikategorikan menjadi tiga bagian yaitu kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2), akses pasilitas kesehatan dan akses fasilitas pendidikan.
 - a. Faktor pendukung dalam pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) adalah adanya bantuan uang tunai PKH. Kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) dikatakan optimal, namun implementasi dalam keluarga tidak bisa dilaksanakan. Disebabkan oleh sistem patriarki yang masih membudi daya dalam keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (PKH). Faktor pendukung lainnya adalah karena adanya dorongan atau pendampingan dari pendamping Sosial PKH.
 - b. Faktor penghambat pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) adalah kuatnya sistem patriarki dalam keluarga penerima manfaat PKH. Semua pekerjaan domestik, termasuk dalam pengasuhan anak (pendidikan dan kesehatan) hanya dikerjakan oleh istri. Sebagai kepala keluarga peran suami sangat rendah terhadap pengasuhan anak.
8. Analisis gender harvard terhadap kegiatan keluarga penerima manfaat PKH desa Tobing adalah terlihat jelas perbedaan aktivitas yang dilakukan istri dengan suami atau anak perempuan dengan anak laki-laki. Mencari nafkah dikerjakan suami dan isti, namun untuk pekerjaan rumah hanya dikerjakan perempuan (istri dan anak perempuan). Untuk akses dan kontrol pada harta benda dalam keluarga didominasi oleh pihak laki-laki. Hal tersebut disebabkan oleh faktor hirarki sosial, struktur kelembagaan serta tingkat ekonomi yang masih sangat rendah.

REFERENSI

- Abdullah, Irwan. 2006. *Dari Domestik ke Publik: Jalan Panjang Pencarian Identitas Perempuan dalam Irwan Abdullah (ed.), Sankan Paran Gender (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.*
- Adrian, Kevin.2024. *Hormon Oksitoksin, Hormon Cinta di Dalam Kehidupan Manusia.*

- dalam alodokter.com
- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Conyers, Diana (2001). *Perencanaan sosial di Dunia ketiga*. Yogyakarta. UGM Pers
- Dewi. Azizah Kusuma. *Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Pada Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya*. Asdaf Kota Surabaya
- Dina Elina Saragih dkk. 2021. *Peran Perempuan Dalam Pengelolaan Bantuan Program Keluarga Harapan: Perspektif Sosiologi Gender*. *Sosio Informa* Vol. 8 No. 03, September-Desember, Tahun 2022. *Kesejahteraan Sosial*.
- Dinas Kominfo Jawa Timur. 2020. Gubernur Jatim : Seluruh Penerima PKH 100% Perempuan. <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/gubernur-jatim-seluruh-penerima-pkh-100-perempuan>. Diunggah pada : 20 Agustus 2020.
- Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara tahun 2023
- Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI. 2008. *Pedoman Umum PKH 2021*.
- Erna Ermawati Chotim dkk.2021.*Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Praktis Dan Strategis Gender Dalam Perspektif Moser*.*Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* Vol. 5 No. 1.
- Faqih, Mansour. (2010). *Analisis Gender dan Transformasi sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti. 2002. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: UMM Press.
- Hanif, Hasrul. dkk, *Laporan Penelitian : Mewujudkan Program Keluarga Harapan yang lebih bermakna : Analisa Gender terhadap Implementasi PKH di Kabupaten Sidoarjo (Jawa Timur) dan Kabupaten Bima (Nusa Tenggara Barat)*. Jakarta : Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia)
- Harahap, Parsadaan Marga. “*Horja: Adat Istiadat Dalihan Natolu.*” Jakarta: Parsadaan Marga Harahap Dohot Anak Boruna, 1993.
- Heruanto, A., & Wahyudi, M. (2022). *The Impact of Conditional Cash Transfers on Low-Income*. *15(1)*, 23–42.
- Holmes, dkk. 2010. *Peran Perlindungan Sosial dan Mengatasi Masalah Ketahanan Pangan dan Gizi Rendah di Indonesia: Sebuah pendekatan Gender*. Jakarta: *the Smeru Research*
- Ibnu Panji Arifin dkk. 2021. *Perempuan Dan Bantuan Sosial (Studi Upaya Pemberdayaan Perempuan Melalui Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan)*. *Jurnal Syntax Admiration* Vol. 2 No. 12 Desember 2021. *Sosial Teknik*.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan. 2001. *Laki-laki dan Perempuan Memang Beda, Tetapi Tidak Untuk Dibeda-bedakan*. Jakarta: Kantor Meneg PP
- Lembaga Penelitian SMERU. 2005. *Gender dan Kemiskinan*. Jakarta:SMERU
- Masrukhin. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sidoarjo: Media Ilmu Press.
- Megawangi, Ratna. *Membiarkan Berbeda?: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*. ATF Pers, 1999.
- Muslim Pohan.2022. *DOUBLE-BURDENED AND MARGINALIZED WOMEN Patriarchal Dominance In The Develovment In Padang Lawas, North Sumatera*. Dalam Al-ahwal : jurnal hukum keluarga islam. Vol 15, no. 2 (2022), pp.241-256.
- Nainggolan, T., & Susantyo, B. (2018). *Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan: Studi di Empat Daerah di Indonesia*. *Sosio Konsepsia*, 31–46. <https://doi.org/10.33007/ska.v7i1.1104>
- Ndaraha, Taliziduhu. 2007. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*. Penerbit Yayasan Karya
- Nugroho, Riant. (2011). *Gender dan Strategi Pengarus-Utamanya di Indonesia*. Yogyakarta :

- Pustaka Pelajar hlm. 9-16.
- Nurhaeni, Ismi Dwi Astuti. 2022. Buku Modul Dan Bahan Ajar Analisis Gender Dalam Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. Jakarta: Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Nurlian dan Harmona Daulay. 2008. Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Kerja Pada Keluarga Petani Ladang (Studi Kasus Analisa Isu Gender pada Keluarga Petani Ladang di Desa Cot Rambong, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, NAD). *Jurnal Harmoni Sosial*, Januari 2008, Volume II, No. 2. Universitas Sumatera Utara.
- Pereznieta, Paola & Georgia Taylor (2014), *Review of evaluation approaches and methods used by interventions on women and girls' economic empowerment* (Gender & Development Vol. 22, No. 2, 2014)
- Program Keluarga Harapan (PKH). 2019. dalam <https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>.
- Purwanti, Ani. (2020). *Kekerasan Berbasis Gender*. Banguntapan Bantul Yogyakarta: Bildung Nusantara
- Rina Gaguk Ika Prayitna dkk. 2018. Evaluasi Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Keberdayaan Perempuan di Bidang Pendidikan Dan Kesehatan. *Spirit Publik* Volume 13, Nomor 1, April.
- Rusydi. 2016. Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Partisipasi Pendidikan Di Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie, dalam *Journal Of Economic Management & Business* - Vol. 17, No. 1, April 2.
- Rusti Dian. 2023. Indonesia Peringkat 3 fatherless country di Dunia, Mempertanyakan Keberadaan Ayah dalam Kehidupan Anak. dalam narasi.tv terbit 4 Mei 2023 https://narasi.tv/read/narasi-daily/indonesia-peringkat-3-fatherless-country-di-dunia-mempertanyakan-keberadaan-ayah-dalam-kehidupan-anak#google_vignette
- Soetrisno Loekman. 2005. Menuju Masyarakat Partisipatif. Yogyakarta: Kansius
- Solekhan. 2012. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas. Malang: SETARA Press
- Suharto, E., (2016). *Membangun Masyarakat Membangun Rakyat. Kajian strategis Pembangunan Sosial dan Pekerja Sosial*. Bandung: Rafika Aditama
- Suntiana. Liawati dkk. (2015). Rancangan Model Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dalam Perspektif Pemberdayaan Perempuan (Kajian Terhadap Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Sumberbabu Kabupaten Jember). *Wacana* vol. 18, No 3
- Syam, Nur. 2012. Agama Pelacur: Dramaturgi Transendental (Yogyakarta: LKiS)
- Wulandari, P. R., Bendesa, I. K. G., & Saskara, I. A. N. (2013). Analisis Partisipasi Masyarakat Dan Kepemimpinan Terhadap Tingkat Keberhasilan Proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Perdesaan Di Kecamatan Gerokgak, Buleleng-Bali. *Buletin Studi Ekonomi*.